

PENGARUH *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI NEGARA ASEAN-5 : PENDEKATAN PANEL ARDL

Lutfia Tsalisati¹; Ahmad Syahrul Fauzi²

Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis,
Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia^{1,2}

Email : tsalisatilutfia@students.unnes.ac.id¹; ahmadsyahrulfauzi@mail.unnes.ac.id²

ABSTRAK

Riset ini menganalisis pengaruh *good governance* terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura) sepanjang kurun waktu 2009–2023. Kualitas tata kelola diukur menggunakan indikator *control of corruption*, *government effectiveness*, dan *regulatory quality*, dengan *Foreign Direct Investment* (FDI) dan *trade openness* sebagai variabel kontrol. Riset ini mengaplikasikan model Panel *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL) estimator *Pooled Mean Group* (PMG) untuk menganalisis relasi jangka pendek dan jangka panjang antarvariabel. Temuan riset memperlihatkan bahwa *government effectiveness*, *control of corruption*, dan *trade openness* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, sedangkan *regulatory quality* berpengaruh negatif. Koefisien *Error Correction Term* yang negatif dan signifikan menegaskan adanya proses konvergensi menuju keseimbangan jangka panjang. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di ASEAN-5.

Kata Kunci : *Good Governance*; Pertumbuhan Ekonomi; ASEAN-5; ARDL; Ekonomi Kelembagaan

ABSTRACT

This study analyzes the impact of good governance on economic growth in ASEAN-5 countries (Indonesia, Malaysia, Thailand, Philippines, and Singapore) during the period 2009–2023. Governance quality is measured using the indicators of control of corruption, government effectiveness, and regulatory quality, with Foreign Direct Investment (FDI) and trade openness included as control variables. This study employs a Panel Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model with the Pooled Mean Group (PMG) estimator to examine both short-run and long-run relationships among the variables. The results indicate that government effectiveness, control of corruption, and trade openness have a positive effect on economic growth in the long run, whereas regulatory quality shows a negative effect. The negative and significant coefficient of the Error Correction Term indicates the presence of an adjustment mechanism toward long-run equilibrium. These findings highlight the importance of strengthening governance to support sustainable economic growth in ASEAN-5 countries.

Keywords : *Good Governance; Economic Growth; ASEAN-5; ARDL; Institutional Economics*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi lazim digunakan untuk menggambarkan capaian pembangunan karena menunjukkan kemampuan suatu negara dalam meningkatkan output dan aktivitas produksi dari waktu ke waktu. Kenaikan pertumbuhan tidak hanya mencerminkan ekspansi ekonomi, tetapi juga memperlihatkan sejauh mana perekonomian mampu menciptakan produktivitas dan kesejahteraan yang lebih baik secara berkelanjutan. Dalam pendekatan pembangunan kontemporer, pertumbuhan tidak semata-mata ditentukan oleh modal dan tenaga

kerja, melainkan juga oleh faktor kelembagaan, kualitas kebijakan, dan kapasitas pemerintah dalam menciptakan iklim ekonomi yang mendukung investasi dan kegiatan produktif (Khan et al., 2022; Nawaz et al., 2020; World Bank, 2023).

Perkembangan teori ekonomi kelembagaan, khususnya *Institutional Economics* dan *New Institutional Economics*, menegaskan bahwa institusi berperan penting dalam membentuk sistem insentif ekonomi, menekan biaya transaksi, serta menciptakan kepastian dalam aktivitas ekonomi (Acemoglu et al., 2005). Institusi yang berfungsi secara efektif mampu membentuk aturan yang stabil, transparan, dan dapat ditegakkan sehingga meningkatkan kepercayaan pelaku ekonomi dan mendorong investasi dalam jangka panjang. Sebaliknya, tata kelola pemerintahan yang lemah berpotensi menimbulkan distorsi ekonomi melalui praktik korupsi, ketidakpastian regulasi, serta inefisiensi birokrasi yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan, konsep *good governance* berkembang sebagai kerangka penting untuk menjelaskan hubungan antara kualitas institusi dan kinerja ekonomi. *Governance* mencerminkan bagaimana otoritas publik menjalankan kekuasaan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik, menyediakan layanan pemerintah, serta menjaga stabilitas ekonomi dan politik (Kaufmann et al., 2019; OECD, 2021). Kualitas *governance* yang baik menunjukkan sejauh mana pemerintah mampu mengelola sumber daya publik secara efektif, menjaga konsistensi kelembagaan, serta menyediakan kebijakan yang mendorong aktivitas ekonomi dan proses pembangunan jangka panjang. Dalam riset ini, *good governance* diukur menggunakan indikator *Worldwide Governance Indicators* (WGI) yang diformulasikan oleh World Bank, dengan fokus pada tiga dimensi utama yaitu *Control of Corruption* (CC), *Government Effectiveness* (GE), dan *Regulatory Quality* (RQ) (Kaufmann et al., 2011).

Kawasan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) menjadi konteks empiris yang relevan untuk mengkaji hubungan antara *good governance* dan pertumbuhan ekonomi. Di tingkat global, ASEAN sering dipandang sebagai kawasan yang mengalami perkembangan ekonomi yang cukup cepat dan dinamis, namun sekaligus menunjukkan tingkat heterogenitas institusional yang cukup tinggi antarnegara anggotanya. Perbedaan tingkat pembangunan ekonomi, kapasitas birokrasi, stabilitas politik, serta kualitas regulasi menyebabkan variasi dalam efektivitas kebijakan ekonomi di masing-masing negara. Pertumbuhan ekonomi merupakan topik penting bagi negara maju dan berkembang mencari pertumbuhan produksi dan konsumsi. Ada beberapa manfaat bagi negara-negara yang ingin memperbaiki pembangunan ekonomi melalui investasi pembangunan manusia. Manfaat utamanya adalah memperbaiki kesejahteraan warga negara. (Bagianto, A., & Zulkarnaen, W. 2020).

Kelompok ASEAN-5 yang terdiri atas Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura memiliki peran strategis sebagai penggerak utama perekonomian kawasan. Secara agregat, negara-negara ASEAN-5 menyumbang lebih dari 80% terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) ASEAN pada tahun 2023, sehingga dinamika ekonomi kelompok negara ini secara substansial merepresentasikan kinerja ekonomi kawasan keseluruhan (ASEAN Secretariat, 2023; International Monetary Fund, 2023). Indonesia menjadi kontributor terbesar dengan ukuran ekonomi yang dominan, sementara Singapura menunjukkan kualitas institusi yang relatif maju dengan tingkat efisiensi birokrasi dan regulasi yang tinggi. Malaysia dan Thailand berada pada tingkat pembangunan menengah dengan struktur ekonomi yang relatif stabil, sedangkan Filipina menunjukkan dinamika pertumbuhan yang lebih fluktuatif akibat faktor domestik maupun eksternal.

Perbedaan kinerja ekonomi tersebut dapat dilihat dari dinamika pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN-5 selama periode 2009–2023 sebagaimana ditampilkan pada Grafik 1. Secara umum, pertumbuhan ekonomi di kawasan ini menunjukkan pola fluktuatif yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global, dinamika perdagangan internasional, serta faktor domestik masing-masing negara. Negara dengan kualitas institusi dan regulasi yang relatif lebih baik cenderung menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dibandingkan negara dengan tata kelola yang lebih lemah. Pola ini mengindikasikan bahwa *good governance* berpotensi memainkan peran penting dalam menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN-5.

Selain itu, perbedaan kualitas institusi juga tercermin dari skor WGI di negara-negara ASEAN-5 sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 2. Singapura secara konsisten memperoleh skor tata kelola yang tinggi pada dimensi *government effectiveness* dan *regulatory quality*, sementara beberapa negara lainnya masih menunjukkan nilai yang lebih rendah dan cenderung fluktuatif. Perbedaan ini mencerminkan variasi efektivitas birokrasi, kualitas regulasi, serta tingkat integritas pemerintahan antarnegara ASEAN-5. Dengan demikian, hubungan antara *good governance* dan pertumbuhan ekonomi di kawasan ini tidak bersifat seragam, melainkan dipengaruhi oleh karakteristik institusional masing-masing negara.

Secara empiris, hubungan antara *good governance* dan pertumbuhan ekonomi telah banyak diteliti, namun hasilnya belum sepenuhnya konsisten. Sebagian studi menemukan bahwa indikator *governance* seperti *control of corruption*, *government effectiveness*, dan *regulatory quality* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Khan et al., 2022; Nguyen et al., 2021). Namun, studi lain menunjukkan bahwa pengaruh tersebut tidak selalu signifikan atau berbeda antarnegara, bahkan pada beberapa kasus hanya terlihat dalam jangka panjang (Addainuri et al., 2023). Perbedaan temuan ini mengindikasikan bahwa hubungan

antara governance dan pertumbuhan ekonomi bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh karakteristik struktural masing-masing negara. Dalam konteks ASEAN-5, studi yang secara simultan menguji tiga dimensi utama *good governance* WGI dengan mempertimbangkan dinamika jangka pendek dan jangka panjang masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menggunakan pendekatan Panel ARDL-PMG.

Berdasarkan kondisi tersebut, penggunaan pendekatan Panel ARDL dengan estimator PMG menjadi relevan untuk menganalisis hubungan antara *good governance* dan pertumbuhan ekonomi. Model ini memungkinkan adanya heterogenitas dinamika jangka pendek antarnegara, namun tetap mengasumsikan kesamaan hubungan jangka panjang di antara negara dengan karakteristik ekonomi yang sebanding (Pesaran et al., 1999). Pendekatan ini juga memungkinkan identifikasi hubungan keseimbangan jangka panjang sekaligus mekanisme penyesuaian jangka pendek melalui kerangka *Error Correction Model* (ECM).

Riset ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh *good governance* terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN-5 dalam kurun waktu 2009–2023 dengan menerapkan model Panel ARDL-PMG. Secara khusus, riset ini menguji pengaruh *Control of Corruption* (CC), *Government Effectiveness* (GE), dan *Regulatory Quality* (RQ) terhadap pertumbuhan ekonomi dengan memasukkan *Foreign Direct Investment* (FDI) dan *trade openness* sebagai variabel kontrol. Melalui analisis empiris, riset ini berupaya memperjelas peran kualitas institusi dalam memengaruhi dinamika pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN serta memberikan implikasi kebijakan bagi penguatan tata kelola pemerintahan dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Institutional Economics dan Kualitas Institusi

Dalam perspektif ekonomi pembangunan modern, kualitas institusi dipandang sebagai salah satu determinan penting pertumbuhan ekonomi jangka panjang. *Institutional Economics* dan *New Institutional Economics* menegaskan bahwa institusi membentuk struktur insentif, menurunkan biaya transaksi, serta menciptakan kepastian dalam interaksi ekonomi (Acemoglu et al., 2005). Institusi yang efektif cenderung memperkuat kredibilitas kebijakan, mendorong investasi, dan memperbaiki alokasi sumber daya. Sebaliknya, institusi yang lemah dapat menimbulkan ketidakpastian, inefisiensi birokrasi, dan distorsi pasar yang menekan kinerja ekonomi.

Secara empiris, Khan et al. (2022) serta Nguyen et al. (2021) menunjukkan bahwa kualitas institusi yang lebih baik berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi karena memperkuat stabilitas ekonomi dan meningkatkan efisiensi kebijakan publik. Namun, temuan ini tidak selalu seragam pada seluruh negara dan periode analisis. Beberapa studi lain

menunjukkan bahwa dampak institusi terhadap pertumbuhan dapat bervariasi bergantung pada tingkat pembangunan, struktur ekonomi, dan kapasitas implementasi kebijakan masing-masing negara. Artinya, kualitas institusi bukan hanya penting secara teoritis, tetapi juga memiliki efek yang bersifat kontekstual.

Dalam kerangka ini, *good governance* menjadi representasi operasional dari kualitas institusi. *Governance* menggambarkan bagaimana otoritas publik menggunakan kewenangannya dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan menegakkan kebijakan publik secara efektif (Kaufmann et al., 2019). WGI dari World Bank menyediakan pengukuran yang relevan karena menangkap dimensi tata kelola yang berkaitan langsung dengan proses pembangunan ekonomi. Dalam penelitian ini, fokus diarahkan pada tiga dimensi utama, yaitu *control of corruption*, *government effectiveness*, dan *regulatory quality*, karena ketiganya paling dekat dengan mekanisme penciptaan iklim ekonomi yang kondusif.

Pengaruh *Control of Corruption* terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Control of corruption menunjukkan kemampuan institusi negara dalam membatasi penyalahgunaan wewenang publik untuk kepentingan pribadi. Korupsi meningkatkan biaya transaksi, menurunkan efisiensi alokasi sumber daya, dan melemahkan kepercayaan investor terhadap kepastian kebijakan. Karena itu, pengendalian korupsi secara teoritis dipandang sebagai syarat penting bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Secara empiris, Widianatasari dan Purwanti (2021) menemukan bahwa pengendalian korupsi berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan efisiensi kebijakan dan perbaikan kualitas institusi. Khan et al. (2022) juga menegaskan bahwa negara dengan tingkat korupsi yang lebih rendah cenderung memiliki stabilitas ekonomi yang lebih baik. Meski demikian, beberapa studi menunjukkan bahwa efek pengendalian korupsi tidak selalu langsung terlihat dalam jangka pendek karena manfaatnya sering muncul setelah proses penyesuaian kelembagaan berlangsung. Dengan demikian, pengaruh *control of corruption* cenderung lebih kuat ketika dianalisis dalam horizon waktu yang lebih panjang.

Berdasarkan argumentasi tersebut, maka dirumuskan hipotesis:

H1: *Control of corruption* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh *Government Effectiveness* terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Government effectiveness mencerminkan kualitas pelayanan publik, kapasitas birokrasi, serta kemampuan pemerintah dalam merancang dan melaksanakan kebijakan secara efektif. Pemerintah yang efektif dapat menciptakan stabilitas kebijakan, meningkatkan efisiensi layanan publik, dan memperkuat kepercayaan pelaku ekonomi. Dalam konteks pembangunan, efektivitas pemerintah menjadi prasyarat bagi terciptanya lingkungan usaha yang kondusif.

Vaniandra dan Prastowo (2024) menunjukkan bahwa *government effectiveness* berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN. Nguyen et al. (2021) juga menemukan bahwa efektivitas pemerintah berperan dalam memperkuat produktivitas ekonomi dan menjaga stabilitas kebijakan. Namun, di beberapa negara berkembang, pengaruh *government effectiveness* kadang tidak sekuat yang diharapkan karena masih dibatasi oleh kapasitas fiskal, fragmentasi birokrasi, atau lemahnya implementasi kebijakan. Ini menunjukkan bahwa efektivitas pemerintah lebih tepat dipahami sebagai faktor struktural yang bekerja secara bertahap.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H2: *Government effectiveness* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh *Regulatory Quality* terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Regulatory quality menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merancang dan mengimplementasikan regulasi yang mendukung perkembangan sektor swasta dan aktivitas ekonomi. Regulasi yang berkualitas memberikan kepastian hukum, mengurangi hambatan usaha, dan menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif. Oleh karena itu, *regulatory quality* dipandang sebagai salah satu kanal utama yang menghubungkan *governance* dengan pertumbuhan ekonomi.

Addainuri et al. (2023) menemukan bahwa *regulatory quality* berperan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN melalui peningkatan efisiensi kebijakan ekonomi. Temuan ini sejalan dengan argumen bahwa regulasi yang stabil dan transparan mampu mendorong investasi dan efisiensi pasar. Namun, studi lain menunjukkan bahwa regulasi yang terlalu kompleks atau inkonsisten justru dapat menjadi hambatan bagi pelaku usaha. Dengan demikian, pengaruh *regulatory quality* tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kualitas implementasinya.

Berdasarkan argumentasi tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H3: *Regulatory quality* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh FDI terhadap Pertumbuhan Ekonomi

FDI merupakan sumber pembiayaan eksternal yang penting bagi negara berkembang karena dapat menambah modal, memperluas kapasitas produksi, dan mendorong transfer teknologi. Selain itu, FDI sering dikaitkan dengan peningkatan produktivitas melalui spillover teknologi dan integrasi ke pasar global. Karena itu, FDI dipandang sebagai variabel kontrol yang relevan dalam model pertumbuhan ekonomi.

Borensztein et al. (1998) menunjukkan bahwa FDI berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui transfer teknologi dan peningkatan efisiensi. Studi yang lebih baru juga menegaskan bahwa manfaat FDI lebih besar pada negara dengan kualitas institusi

yang baik dan stabilitas kebijakan yang memadai (Khan et al., 2022). Meski demikian, dampak FDI tidak selalu otomatis positif, karena manfaatnya sangat bergantung pada kapasitas absorptif negara tuan rumah. Oleh sebab itu, memasukkan FDI dalam model penting untuk menangkap pengaruh eksternal yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan argumentasi tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H4: *Foreign Direct Investment* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh *Trade Openness* terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Trade openness menunjukkan tingkat keterbukaan suatu negara terhadap perdagangan internasional. Secara teoritis, keterbukaan perdagangan memungkinkan spesialisasi berdasarkan keunggulan komparatif, memperluas pasar, dan meningkatkan efisiensi produksi. Dalam konteks pertumbuhan, *trade openness* sering dipandang sebagai kanal penting untuk mempercepat integrasi ekonomi dan memperbesar peluang ekspor.

Frankel dan Romer (1999) menemukan bahwa perdagangan internasional dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui perluasan pasar dan efisiensi alokasi sumber daya. Namun, sejumlah studi lain menunjukkan bahwa manfaat keterbukaan perdagangan dapat berbeda antarnegara, tergantung pada struktur industri, kesiapan infrastruktur, dan kualitas institusi domestik. Ini berarti *trade openness* tidak selalu berdampak sama kuat di setiap konteks, sehingga perlu dikendalikan dalam model empiris.

Berdasarkan argumentasi tersebut, hipotesis yang dirumuskan adalah:

H5: *Trade openness* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan uraian teoritis dan empiris di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara *good governance* dan pertumbuhan ekonomi telah banyak dibahas, tetapi masih menyisakan beberapa celah penelitian. Pertama, temuan empiris mengenai pengaruh *control of corruption*, *government effectiveness*, dan *regulatory quality* belum sepenuhnya konsisten antarnegara dan antarperiode. Kedua, sebagian besar studi masih menggunakan model panel statis yang kurang mampu menangkap dinamika jangka pendek dan penyesuaian jangka panjang. Ketiga, penelitian yang secara khusus menguji tiga dimensi utama *good governance* WGI pada konteks ASEAN-5 dengan periode yang cukup panjang masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi gap tersebut dengan menganalisis pengaruh *control of corruption*, *government effectiveness*, dan *regulatory quality* terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN-5 periode 2009–2023 menggunakan pendekatan Panel ARDL-PMG, sehingga mampu membedakan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang secara lebih komprehensif.

METODE PENELITIAN

Riset ini mengaplikasikan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang disusun dalam bentuk data panel, yaitu kombinasi antara dimensi *cross-section* dan *time*

series. Objek riset meliputi ASEAN-5, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura, dengan periode pengamatan 2009–2023. Penentuan periode tersebut bertujuan untuk menangkap dinamika pertumbuhan ekonomi serta perubahan *good governance* secara lebih komprehensif dalam jangka menengah dan panjang.

Pemilihan ASEAN-5 didasarkan pada peran strategis kelompok negara ini sebagai kontributor utama terhadap output dan aktivitas ekonomi kawasan *Association of Southeast Asian Nations*. Berdasarkan estimasi International Monetary Fund, kontribusi gabungan ASEAN-5 mencapai lebih dari 80% terhadap total PDB ASEAN, sehingga dinamika ekonomi kelompok ini secara substansial merepresentasikan arah pertumbuhan ekonomi kawasan. Selain itu, negara-negara ASEAN-5 menunjukkan tingkat keterbukaan perdagangan dan integrasi global yang tinggi, namun memiliki variasi kualitas institusi yang cukup signifikan. Perbedaan tersebut tercermin dalam variasi kapasitas birokrasi, tingkat pengendalian korupsi, serta efektivitas dan kualitas regulasi publik di masing-masing negara. Kondisi ini menjadikan ASEAN sebagai konteks empiris yang relevan untuk menguji peran kualitas *governance* dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (Addainuri et al., 2023; Vaniandra & Prastowo, 2024).

Data pertumbuhan ekonomi yang diproksi oleh *GDP Growth* diperoleh dari *World Development Indicators* (WDI) yang diterbitkan oleh World Bank. Variabel kontrol berupa FDI juga bersumber dari WDI dan digunakan untuk menangkap peran arus modal asing dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, indikator tata kelola pemerintahan yang mencakup Control of Corruption (CC), Government Effectiveness (GE), Regulatory Quality (RQ) diperoleh dari WGI World Bank. Seluruh data disusun dalam bentuk panel dengan observasi yang lengkap dan konsisten untuk seluruh negara dan periode pengamatan. Definisi operasional masing-masing variabel, termasuk satuan pengukuran dan sumber data, disajikan secara ringkas pada Tabel 1.

Metode Estimasi Panel ARDL dengan PMG

Riset ini mengaplikasikan pendekatan metode Panel ARDL dengan estimator PMG yang dikembangkan oleh Pesaran et al. (1999). Pendekatan ini memungkinkan heterogenitas dinamika jangka pendek antarnegara, namun mengasumsikan homogenitas koefisien jangka panjang. Model ARDL dapat diterapkan pada kombinasi variabel yang terintegrasi pada orde $I(0)$ dan $I(1)$, sepanjang tidak adanya variabel yang terintegrasi pada orde $I(2)$ (Pesaran et al., 2001). Dalam analisis panel dinamis, pendekatan PMG banyak dimanfaatkan untuk memperkirakan hubungan jangka pendek dan jangka panjang secara simultan pada data lintas negara (Blackburne & Frank, 2007), termasuk dalam studi empiris kawasan ASEAN (Priastiwi & Fatmawati, 2026).

Model ARDL selanjutnya ditransformasikan ke dalam bentuk ECM untuk mengidentifikasi proses penyesuaian menuju keseimbangan jangka panjang. Koefisien *Error Correction Term* (ECT) yang bernilai negatif dan signifikan secara statistik mengindikasikan adanya mekanisme penyesuaian dari ketidakseimbangan jangka pendek menuju keseimbangan jangka panjang. Proses estimasi dalam riset ini dilakukan melalui beberapa tahapan analisis. Pertama, dilakukan uji stasioneritas data panel menggunakan Fisher-type Augmented Dickey–Fuller (ADF) agar memastikan bahwa tidak adanya variabel yang terintegrasi pada orde dua I(2). Kedua, penentuan panjang lag optimal dilakukan berdasarkan Akaike Information Criterion (AIC) dengan mempertimbangkan stabilitas model dan keberhasilan konvergensi estimasi. Ketiga, estimasi hubungan jangka pendek dan jangka panjang dilakukan menggunakan model Panel ARDL dengan estimator PMG. Tahap akhir dilakukan evaluasi koefisien ECT untuk mengonfirmasi keberadaan kointegrasi serta kecepatan penyesuaian menuju keseimbangan jangka panjang.

Model empiris dalam riset ini disusun untuk menganalisis pengaruh *good governance* terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN-5 selama periode 2009–2023. Variabel dependen adalah pertumbuhan ekonomi yang diproksi oleh pertumbuhan Produk Domestik Bruto riil (GDP Growth). Variabel independen utama mencakup indikator *good governance*, yaitu Control of Corruption (CC), Government Effectiveness (GE), dan Regulatory Quality (RQ). FDI dan Trade Openness (TO) digunakan sebagai variabel kontrol untuk memperhitungkan pengaruh keterbukaan ekonomi terhadap pertumbuhan. FDI diukur sebagai aliran bersih investasi asing langsung dalam persen Produk Domestik Bruto (GDP), mencerminkan kontribusi modal asing terhadap ekonomi domestik. Trade Openness dihitung sebagai rasio total ekspor dan impor terhadap GDP, untuk menilai sejauh mana perekonomian terintegrasi dengan perdagangan internasional. Kedua variabel ini relevan dalam konteks ASEAN-5 karena negara-negara anggota memiliki tingkat integrasi perdagangan dan arus modal asing yang tinggi, yang dapat memengaruhi efektivitas tata kelola dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (World Bank, 2023).

Secara umum, spesifikasi dasar dirumuskan dalam model panel ARDL sebagai berikut:

$$GDPG_{it} = \beta_0 + \beta_1 GDPG_{i,t-1} + \beta_2 CC_{it} + \beta_3 GE_{it} + \beta_4 RQ_{it} + \beta_5 FDI_{it} + \beta_6 TO_{it} + \varepsilon_{it}$$

$GDPG_{i,t-1}$: Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto riil periode sebelumnya

GDPG : Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto riil

CC : *Control of Corruption*

GE : *Government Effectiveness*

RQ : *Regulatory Quality*

FDI : *Foreign Direct Investment*

TO	: Trade Openness
ε	: error term
i	: Negara
t	: Tahun

Untuk mengidentifikasi hubungan jangka pendek dan jangka panjang secara eksplisit, model ARDL ditransformasikan ke dalam bentuk ECM sebagai berikut:

$$\Delta \text{GDPG}_{it} = \sum_{k=1}^{p-1} \beta_1^k \Delta \text{GDPG}_{i,t-k} + \sum_{k=0}^{q-1} \beta_2^k \Delta \text{CC}_{i,t-k} + \sum_{k=0}^{q-1} \beta_3^k \Delta \text{GE}_{i,t-k} + \sum_{k=0}^{q-1} \beta_4^k \Delta \text{RQ}_{i,t-k} + \sum_{k=0}^{q-1} \beta_5^k \Delta \text{FDI}_{i,t-k} + \sum_{k=0}^{q-1} \beta_6^k \Delta \text{TO}_{i,t-k} + \lambda \text{ECT}_{i,t-1} + \varepsilon_{it}$$

ECT ($\text{ECT}_{i,t-1}$) merepresentasikan deviasi dari keseimbangan jangka panjang pada periode sebelumnya. Koefisien λ diharapkan bernilai negatif dan signifikan secara statistik, yang memperlihatkan adanya proses penyesuaian dari ketidakseimbangan jangka pendek menuju keseimbangan jangka panjang. Dalam model ARDL, parameter k menunjukkan jumlah lag maksimum dari variabel dependen berdasarkan hasil estimasi ARDL, sedangkan p dan q masing-masing menunjukkan jumlah lag maksimum yang dapat digunakan pada variabel dependen dan variabel independen dalam model. Penentuan panjang lag ini penting untuk menangkap dinamika hubungan antarvariabel dalam jangka pendek sekaligus memastikan kestabilan estimasi model. Koefisien ECT diharapkan bernilai negatif dan signifikan, yang mengindikasikan adanya hubungan kointegrasi serta mekanisme penyesuaian yang cepat menuju keseimbangan jangka panjang.

Karakteristik ini menjadikan model PMG-ARDL relevan untuk menganalisis hubungan antara *good governance* dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN-5 yang memiliki perbedaan struktural jangka pendek, tetapi berbagi kecenderungan kebijakan dan kerangka institusional jangka panjang yang relatif serupa.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Analisis Statistik Deskriptif

Riset ini memanfaatkan data panel yang terdiri dari lima negara anggota ASEAN-5, dengan rentang waktu pengamatan dari tahun 2009 hingga 2023. Kombinasi dimensi negara dan waktu tersebut menghasilkan total 75 observasi yang digunakan dalam proses analisis. Untuk menganalisis hubungan antara *good governance* dan pertumbuhan ekonomi, riset ini menerapkan metode ARDL. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengidentifikasi perbedaan dinamika pengaruh variabel baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Statistik deskriptif variabel riset disajikan pada Tabel 2. Tabel tersebut memuat variabel pertumbuhan ekonomi, indikator tata kelola pemerintahan, serta variabel kontrol pada negara-negara ASEAN-5 selama periode 2009–2023. Rata-rata pertumbuhan ekonomi (GDP Growth) tercatat sebesar 4,073%, yang menunjukkan bahwa secara umum negara-negara ASEAN-5

mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif moderat selama periode pengamatan. Namun demikian, nilai minimum sebesar -9,520% mencerminkan adanya kontraksi ekonomi yang signifikan pada tahun-tahun tertentu, yang dapat dikaitkan dengan guncangan eksternal seperti krisis keuangan global dan pandemi COVID-19 (World Bank, 2023).

Standar deviasi GDP Growth yang relatif tinggi (3,54) mengindikasikan adanya volatilitas pertumbuhan ekonomi antarnegara dan antarwaktu, yang umum terjadi pada negara berkembang dengan tingkat keterbukaan ekonomi yang tinggi (Barro & Sala-i-Martin, 2004). Variabel *Control of Corruption* (CC) memiliki nilai rata-rata positif sebesar 0,14, namun dengan rentang nilai yang cukup lebar, menunjukkan perbedaan tingkat pengendalian korupsi yang signifikan antarnegara ASEAN-5. Kondisi ini sejalan dengan temuan Kaufmann et al. (2011) yang menekankan bahwa disparitas kualitas institusi merupakan karakteristik utama negara-negara berkembang di kawasan regional. *Government Effectiveness* dan *Regulatory Quality* mencerminkan aspek utama tata kelola pemerintahan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. *Government Effectiveness* mengukur kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif, termasuk kualitas birokrasi, kredibilitas implementasi kebijakan, dan penyediaan layanan publik.

Nilai rata-rata *Government Effectiveness* di ASEAN-5 sebesar 0,70 menunjukkan bahwa secara umum pemerintah di kawasan ini mampu merancang dan melaksanakan kebijakan dengan baik, sehingga menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. *Regulatory Quality* mengukur seberapa baik regulasi dan peraturan pemerintah mendukung kegiatan ekonomi, termasuk kemudahan berbisnis, konsistensi regulasi, dan minimnya hambatan terhadap investasi dan inovasi. Rata-rata *Regulatory Quality* ASEAN-5 sebesar 0,56 menunjukkan bahwa regulasi di kawasan ini relatif mendukung aktivitas ekonomi, meskipun efektivitasnya masih bervariasi antarnegara. Dalam skala estimasi -2,5 hingga +2,5, nilai rata-rata global WGI umumnya berada di sekitar titik netral (0). Oleh karena itu, rata-rata nilai positif pada negara-negara ASEAN-5 mengindikasikan kualitas institusi yang relatif lebih baik dibandingkan negara-negara dengan skor negatif dalam distribusi global. Temuan ini menegaskan bahwa *Government Effectiveness* dan *Regulatory Quality* di ASEAN-5 berada di atas rata-rata global, sekaligus menunjukkan perlunya perbaikan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkesinambungan (Kaufmann et al., 2011; World Bank, 2024).

Hasil Estimasi Model ARDL

Hasil pengujian stasioneritas data panel dengan metode Fisher-type Augmented Dickey–Fuller (ADF) disajikan pada Tabel 3. Berdasarkan hasil tersebut, seluruh variabel riset belum menunjukkan sifat stasioner pada tingkat level, tetapi menjadi stasioner setelah dilakukan

diferensiasi pertama (*first difference*). Hal ini diperlihatkan oleh nilai probabilitas ADF–Fisher dan ADF–Choi yang berada di bawah tingkat signifikansi 5%. Dengan demikian, seluruh variabel dapat dinyatakan terintegrasi pada orde satu atau I(1).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa data memenuhi prasyarat penggunaan model Panel ARDL, karena pendekatan ARDL memperbolehkan kombinasi variabel yang terintegrasi pada orde I(0) dan I(1), sepanjang tidak adanya variabel yang terintegrasi pada orde dua I(2) (Pesaran et al., 2001). Berdasarkan hasil pengujian, tidak ditemukan variabel yang bersifat I(2), sehingga estimasi hubungan jangka panjang dan jangka pendek dapat dilakukan secara valid dan tidak menimbulkan masalah regresi semu (*spurious regression*).

Stasioneritas pada tingkat *first difference* juga mengindikasikan bahwa meskipun variabel-variabel seperti pertumbuhan ekonomi, tata kelola pemerintahan yang baik, investasi asing, dan keterbukaan perdagangan menunjukkan tren dalam jangka panjang, fluktuasinya tetap terkendali setelah penyesuaian diferensiasi. Dengan demikian, analisis dapat dilanjutkan pada tahap pengujian kointegrasi dan estimasi model ARDL untuk mengidentifikasi hubungan keseimbangan jangka panjang serta dinamika penyesuaian jangka pendek antarvariabel.

Berdasarkan Akaike Information Criterion (AIC), spesifikasi terbaik yang dipilih adalah ARDL(1,1,1,1,1) dengan nilai AIC sebesar 4.681085. Penggunaan satu lag menyebabkan periode estimasi efektif menjadi 2010–2023 sehingga jumlah observasi yang digunakan adalah 70. Model ini selanjutnya digunakan sebagai dasar estimasi hubungan jangka panjang dan dinamika jangka pendek. Dengan demikian, sampel efektif mencakup periode 2010–2023 untuk setiap negara (N = 70 observasi), setelah memperhitungkan kehilangan derajat kebebasan akibat penggunaan lag.

Hasil estimasi Panel ARDL-PMG disajikan pada Tabel 4. Hasil estimasi Panel ARDL berdasarkan kriteria Akaike (AIC) menunjukkan adanya hubungan jangka panjang yang signifikan antara *good governance* (CC, GE, RQ), FDI, keterbukaan perdagangan (TO), dan pertumbuhan ekonomi di ASEAN-5. Dalam jangka panjang, Government Effectiveness (GE) berpengaruh positif dan signifikan ($\beta = 10.49368$; $p < 0,01$), sementara *Control of Corruption* (CC) juga berpengaruh positif namun signifikan pada tingkat 10% ($\beta = 3.074742$; $p = 0,0927$). Sebaliknya, Regulatory Quality (RQ) berpengaruh negatif dan signifikan ($\beta = -15.85006$; $p < 0,01$). Untuk variabel kontrol, FDI ($\beta = 0.379604$; $p < 0,05$) dan TO ($\beta = 0.246146$; $p < 0,01$) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Dalam jangka pendek, ECT bernilai negatif dan signifikan ($\beta = -0.953687$; $p = 0.0002$), yang mengindikasikan bahwa setiap ketidakseimbangan jangka pendek akan kembali menuju keseimbangan jangka panjang dengan kecepatan penyesuaian sekitar 95% per periode. Nilai ECT mendekati satu menunjukkan penyesuaian yang sangat cepat dalam konteks data tahunan;

temuan ini mengindikasikan koreksi ketidakseimbangan terjadi dalam waktu relatif singkat. Namun, koefisien variabel perubahan jangka pendek (ΔCC , ΔGE , ΔRQ , ΔFDI , ΔTO) tidak signifikan ($p > 0,05$), yang menunjukkan bahwa fluktuasi sementara pada variabel-variabel tersebut tidak berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek.

Nilai ECT untuk setiap negara ditampilkan pada Tabel 5a. Hasil estimasi menunjukkan bahwa seluruh negara memiliki koefisien ECT yang bernilai negatif dan signifikan secara statistik, yang mengindikasikan adanya proses penyesuaian menuju keseimbangan jangka panjang. Kecepatan penyesuaian berbeda antarnegara, di mana Thailand menunjukkan kecepatan penyesuaian paling tinggi, diikuti oleh Indonesia, Filipina, Singapura, dan Malaysia. Perlu dicatat bahwa nilai ECT pada beberapa negara bernilai kurang dari -1 (misalnya Thailand dan Indonesia). Secara teknis, koefisien ECT yang lebih kecil dari -1 dapat mengindikasikan adanya penyesuaian yang sangat cepat dan berpotensi overshooting (penyesuaian berlebih) sehingga proses konvergensi dapat bersifat berosilasi. Oleh karena itu, interpretasi 'kecepatan penyesuaian' perlu dilakukan secara hati-hati dan dapat dipengaruhi oleh volatilitas pertumbuhan serta adanya guncangan eksternal pada periode pengamatan. Temuan ini dapat menjadi dasar untuk melakukan pemeriksaan tambahan seperti alternatif panjang lag atau uji stabilitas model untuk memastikan konsistensi dinamika penyesuaian.

Hasil estimasi jangka pendek menunjukkan adanya perbedaan antarnegara dalam mekanisme penyesuaian pertumbuhan ekonomi terhadap perubahan kualitas tata kelola dan variabel kontrol. Hasil estimasi memperlihatkan bahwa ECT di seluruh negara memiliki nilai negatif dan signifikan, yang mengindikasikan adanya mekanisme penyesuaian menuju keseimbangan jangka panjang, meskipun proses penyesuaiannya tidak sama antarnegara. Thailand (-1,756; $p < 0,01$) menunjukkan kecepatan penyesuaian paling tinggi, diikuti Indonesia (-1,039; $p < 0,05$), Filipina (-0,953; $p < 0,01$), Singapura (-0,640; $p < 0,01$), dan Malaysia (-0,379; $p < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa ketidakseimbangan jangka pendek di masing-masing negara akan dikoreksi dalam periode berikutnya, dengan intensitas yang bervariasi.

Pada variabel jangka pendek, sebagian besar indikator tata kelola (ΔCC , ΔGE , ΔRQ) tidak signifikan di seluruh negara, yang menunjukkan bahwa perubahan kualitas institusi tidak langsung memengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Namun demikian, variabel keterbukaan perdagangan (ΔTO) signifikan di beberapa negara seperti Malaysia ($p < 0,01$), Filipina ($p < 0,01$), Singapura ($p < 0,01$), dan Thailand ($p < 0,01$), yang mengindikasikan bahwa perubahan tingkat integrasi perdagangan berdampak langsung terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi dalam periode singkat. Selain itu, FDI signifikan di Singapura ($p < 0,01$) dan marginal signifikan di Thailand ($p < 0,10$), menunjukkan bahwa arus investasi asing

memiliki pengaruh jangka pendek yang lebih terlihat pada negara dengan struktur ekonomi yang lebih terbuka. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun hubungan jangka panjang bersifat homogen dalam pendekatan PMG, dinamika jangka pendek bersifat heterogen antarnegara ASEAN-5. Perbedaan struktur ekonomi, tingkat keterbukaan, dan kapasitas institusional menjadi faktor yang memengaruhi variasi respons pertumbuhan ekonomi terhadap perubahan variabel-variabel tersebut.

Hasil estimasi jangka panjang memperlihatkan bahwa *Control of Corruption* berpengaruh positif dan signifikan pada tingkat signifikansi 10%. Hal ini mengindikasikan bahwa perbaikan dalam upaya pengendalian korupsi berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Secara teoritis, pengendalian korupsi berperan dalam mengurangi distorsi alokasi sumber daya, meningkatkan efisiensi belanja publik, serta memperkuat kepercayaan investor terhadap institusi negara (Acemoglu et al., 2005). Hasil ini konsisten dengan temuan Kaufmann et al. (2011) dan Widianatasari dan Purwanti (2021) yang menunjukkan bahwa pengendalian korupsi merupakan prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di negara berkembang.

Government Effectiveness (GE) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang pada tingkat signifikansi 1%. Koefisien yang relatif tinggi menunjukkan bahwa efektivitas birokrasi, kualitas pelayanan publik, serta kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah berperan signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN-5. Temuan ini memperkuat argumen *New Institutional Economics* yang menekankan bahwa institusi publik yang efektif mampu menurunkan biaya transaksi dan meningkatkan produktivitas ekonomi (North, 1990). Hasil riset ini juga selaras dengan studi empiris terbaru yang menemukan bahwa peningkatan efektivitas pemerintah berdampak positif terhadap kinerja ekonomi di negara-negara Asia Tenggara (Vaniandra & Prastowo, 2024).

Regulatory Quality (RQ) menunjukkan koefisien negatif dan signifikan pada tingkat 1% dalam jangka panjang. Hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas regulasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang di ASEAN-5. Dalam konteks negara berkembang, reformasi regulasi sering kali diiringi dengan penyesuaian struktural, peningkatan biaya kepatuhan, serta restrukturisasi sektor usaha yang dapat menimbulkan tekanan jangka menengah terhadap pertumbuhan ekonomi (Rodrik, 2008). Temuan ini selaras dengan Addainuri et al. (2023) yang memperlihatkan bahwa dampak regulasi terhadap pertumbuhan bersifat kontekstual dan sangat bergantung pada kesiapan institusional dan kapasitas pelaku ekonomi domestik. Koefisien RQ yang negatif dapat mencerminkan efek transisi reformasi regulasi dan/atau korelasi tinggi antar dimensi

governance yang menyebabkan perubahan tanda koefisien ketika ketiganya dimasukkan bersamaan.

Variabel kontrol FDI menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Hasil ini menunjukkan bahwa arus investasi asing langsung berperan dalam meningkatkan kapasitas produksi, transfer teknologi, serta integrasi ekonomi regional. Namun demikian, literatur juga menekankan bahwa manfaat FDI sangat bergantung pada kualitas institusi dan kemampuan absorpsi ekonomi domestik (Borensztein et al., 1998). Oleh karena itu, hasil positif FDI dalam riset ini memperkuat argumen bahwa perbaikan tata kelola pemerintahan menjadi faktor pendukung penting dalam memaksimalkan manfaat investasi asing.

Variabel Trade Openness (TO) juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Tingkat keterbukaan perdagangan memberikan peluang bagi negara-negara ASEAN-5 untuk memanfaatkan keunggulan komparatif, memperluas akses pasar ekspor, serta meningkatkan efisiensi produksi melalui persaingan di pasar internasional. Temuan ini selaras dengan teori perdagangan internasional serta berbagai studi empiris yang memperlihatkan adanya hubungan positif antara keterbukaan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia (ASEAN Secretariat, 2022; Frankel & Romer, 1999).

Hasil estimasi jangka pendek menunjukkan seluruh variabel independen tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perubahan dalam kualitas *good governance* belum memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa reformasi institusional merupakan proses jangka panjang yang efeknya baru terasa setelah melalui mekanisme penyesuaian struktural (Rodrik, 2008). Dengan demikian, hasil jangka pendek yang tidak signifikan tidak dapat diartikan sebagai kegagalan reformasi, melainkan mencerminkan sifat gradual dari perbaikan tata kelola pemerintahan. Koefisien ECT bernilai negatif dan signifikan pada tingkat 1%, yang memperlihatkan adanya mekanisme penyesuaian menuju keseimbangan jangka panjang. Nilai koefisien sebesar -0,95 mengindikasikan bahwa sekitar 95% ketidakseimbangan jangka pendek akan dikoreksi dalam satu periode.

Secara keseluruhan, hasil estimasi pada Tabel 4 menegaskan bahwa *good governance* mempunyai andil penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di ASEAN-5, terutama dalam jangka panjang. Temuan ini menekankan bahwa kebijakan pembangunan tidak hanya perlu berfokus pada faktor makroekonomi konvensional, tetapi juga pada penguatan institusi publik, pengendalian korupsi, serta peningkatan efektivitas birokrasi. Implikasi kebijakan dari

hasil ini adalah perlunya strategi reformasi tata kelola yang konsisten dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing di kawasan ASEAN.

KESIMPULAN

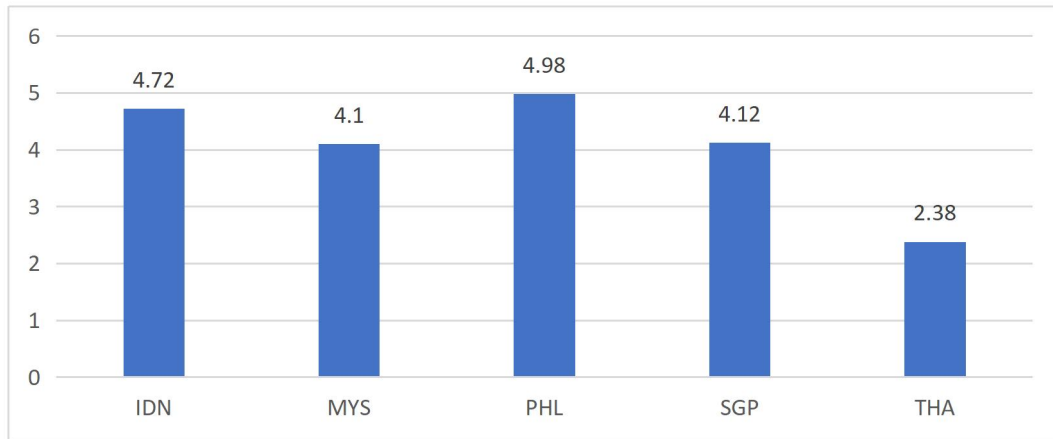
Riset ini menunjukkan bahwa *good governance* memengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN-5 dalam jangka panjang. Hasil estimasi Panel ARDL-PMG memperlihatkan bahwa *government effectiveness* dan *control of corruption* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, yang menunjukkan efektivitas birokrasi, kualitas layanan publik, serta pengendalian korupsi menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan produktif. Sementara itu, *regulatory quality* menunjukkan pengaruh negatif yang dikaitkan dengan proses penyesuaian struktural dalam reformasi regulasi. Selain itu, variabel kontrol berupa FDI dan *trade openness* juga terbukti berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas institusi dan tingkat keterbukaan ekonomi merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di kawasan ASEAN-5. Implikasi dari riset ini menegaskan bahwa pemerintah di negara-negara ASEAN-5 perlu memperkuat kapasitas institusi publik melalui peningkatan efektivitas birokrasi, konsistensi dalam perumusan kebijakan, serta penguatan upaya pengendalian korupsi. Reformasi regulasi juga perlu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan institusional dan kapasitas sektor ekonomi domestik untuk menghindari jangka menengah terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kebijakan yang mendukung keterbukaan perdagangan dan peningkatan arus investasi asing perlu dikembangkan karena terbukti memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi ketika didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik. Riset ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, riset ini hanya menggunakan tiga indikator *governance* dari WGI sehingga belum mencerminkan seluruh dimensi *good governance* secara komprehensif. Kedua, cakupan riset terbatas pada lima negara ASEAN sehingga hasil riset belum dapat digeneralisasi untuk seluruh negara ASEAN. Oleh karena itu, riset kedepannya disarankan untuk memperluas cakupan negara dan periode riset, serta memasukkan indikator *governance* lainnya seperti *rule of law*, *political stability*, atau *voice and accountability* agar dapat menyajikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara *good governance* dan pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

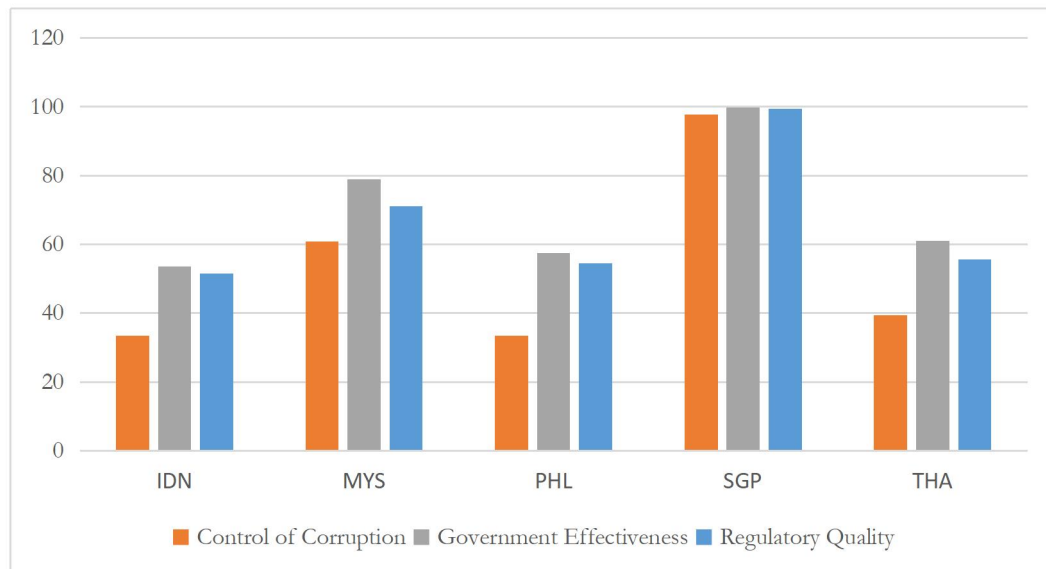
- Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2005). Institutions as a Fundamental Cause of Long-Run Growth. In P. Aghion & S. N. Durlauf (Eds.), *Handbook of Economic Growth* (Vol. 1A, pp. 385–472). Elsevier.
- Addainuri, M. I., Abidin, M., & Suci, L. E. (2023). Analisis Dampak Governance terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara ASEAN. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 14(2), 155–172.
- ASEAN Secretariat. (2022). *ASEAN Statistical Yearbook 2022*. ASEAN Secretariat.
- ASEAN Secretariat. (2023). *ASEAN Statistical Highlights 2023*. ASEAN Secretariat.

- Bagianto, A., & Zulkarnaen, W. (2020). FACTORS AFFECTING ECONOMIC DEVELOPMENT. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 4(1), 316-332. <https://doi.org/10.31955/mea.v4i1.263>.
- Barro, R. J., & Sala-i-Martin, X. (2004). *Economic Growth* (2nd ed.). MIT Press.
- Blackburne, E. F., & Frank, M. W. (2007). Estimation of Nonstationary Heterogeneous Panels. *The Stata Journal*, 7(2), 197–208. <https://doi.org/10.1177/1536867X0700700204>
- Borensztein, E., De Gregorio, J., & Lee, J.-W. (1998). How Does Foreign Direct Investment Affect Economic Growth? *Journal of International Economics*, 45(1), 115–135. [https://doi.org/10.1016/S0022-1996\(97\)00033-0](https://doi.org/10.1016/S0022-1996(97)00033-0)
- Frankel, J. A., & Romer, D. (1999). Does Trade Cause Growth? *American Economic Review*, 89(3), 379–399. <https://doi.org/10.1257/aer.89.3.379>
- International Monetary Fund. (2023). *Regional Economic Outlook: Asia and Pacific*. International Monetary Fund.
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2011). The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues. *Hague Journal on the Rule of Law*, 3(2), 220–246. <https://doi.org/10.1017/S1876404511200046>
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2019). *Worldwide Governance Indicators Methodology and Analytical Issues*. World Bank.
- Khan, H., Khan, S., & Zuojun, F. (2022). Institutional Quality and Financial Development: Evidence from Developing and Emerging Economies. *Global Business Review*, 23(4), 971–983. <https://doi.org/10.1177/0972150919892366>
- Nawaz, S., Iqbal, N., & Khan, M. A. (2020). The Impact of Institutional Quality on Economic Growth: Panel Evidence. *Economic Research-Ekonomska Istraživanja*, 33(1), 120–141. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2019.1674176>
- Nguyen, C. P., Su, T. D., & Nguyen, T. V. H. (2021). Institutional Quality and Economic Growth: The Case of Emerging Economies. *Economic Systems*, 45(4), 100884. <https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2021.100884>
- North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press.
- OECD. (2021). *Government at a Glance 2021*. OECD Publishing.
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. *Journal of Applied Econometrics*, 16(3), 289–326. <https://doi.org/10.1002/jae.616>
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. P. (1999). Pooled Mean Group Estimation of Dynamic Heterogeneous Panels. *Journal of the American Statistical Association*, 94(446), 621–634. <https://doi.org/10.1080/01621459.1999.10474156>
- Priastiwi, D., & Fatmawati, A. (2026). Economic Growth and Carbon Emissions: An ARDL Panel Study of 10 ASEAN Countries. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 10(1), 72–82.
- Rodrik, D. (2008). Second-Best Institutions. *American Economic Review*, 98(2), 100–104. <https://doi.org/10.1257/aer.98.2.100>
- Vaniandra, H., & Prastowo, P. (2024). Analisis Pengaruh Kualitas Institusi dan Foreign Direct Investment terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara ASEAN. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 3(2), 136–146.
- Widianatasari, A., & Purwanti, E. Y. (2021). Pengaruh Kualitas Institusi, Pengeluaran Pemerintah, dan Foreign Direct Investment terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Ecoplan*, 4(2), 86–98.
- World Bank. (2023). *World Development Indicators (WDI)*. World Bank.
- World Bank. (2024). *World Development Indicators Database*. World Bank.

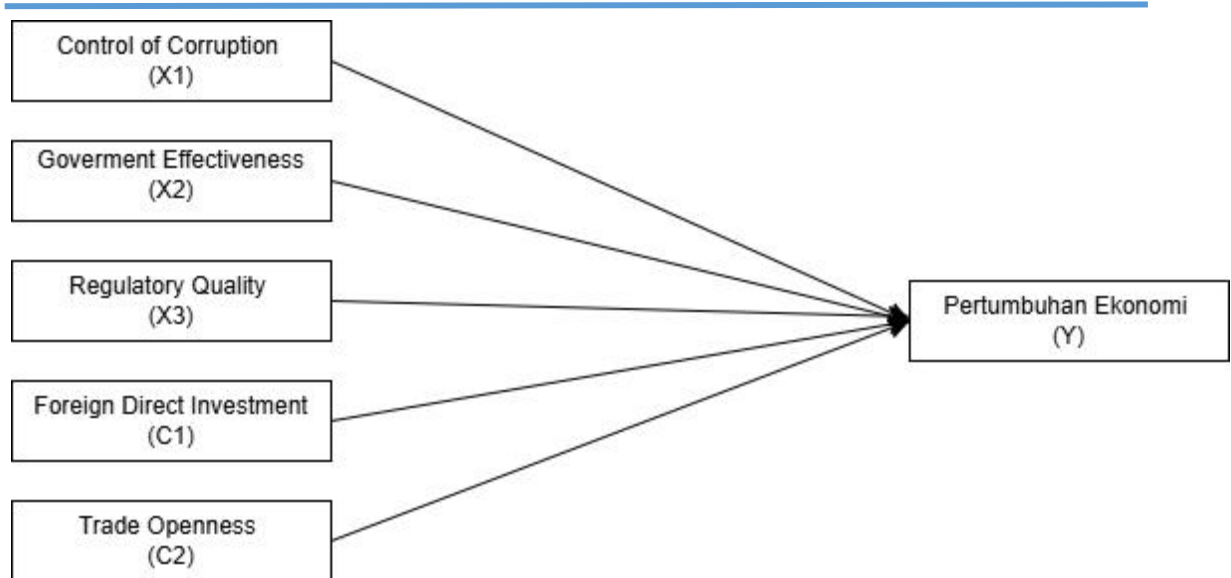
GAMBAR, GRAFIK DAN TABEL



Grafik 1. Dinamika Pertumbuhan Ekonomi Negara ASEAN-5 Periode 2009–2023
Sumber: World Development Indicators, World Bank (2023)



Grafik 2. Perbandingan Kualitas Governance Negara ASEAN-5 Berdasarkan Worldwide Governance Indicators
Sumber: Worldwide Governance Indicators, World Bank (2024)



Gambar 1. Kerangka Berpikir Riset
Sumber: Penulis (2026)

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel Riset

Variabel	Definisi	Sumber
GDP Growth (GDPG)	Laju pertumbuhan tahunan Produk Domestik Bruto riil yang mencerminkan kemampuan suatu perekonomian dalam meningkatkan output riil dari waktu ke waktu.	World Development Indicators (WDI), World Bank
Control of Corruption (CC)	Mengukur persepsi mengenai sejauh mana kekuasaan publik digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk praktik korupsi dalam bentuk kecil (<i>petty corruption</i>) maupun besar (<i>grand corruption</i>).	Worldwide Governance Indicators (WGI), World Bank
Government Effectiveness (GE)	Menggambarkan persepsi mengenai kualitas layanan publik, kompetensi birokrasi pemerintah, kualitas perumusan kebijakan, serta kredibilitas komitmen pemerintah dalam melaksanakan kebijakan.	Worldwide Governance Indicators (WGI), World Bank
Regulatory Quality (RQ)	Mencerminkan kemampuan pemerintah dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan serta regulasi yang mendukung perkembangan sektor swasta dan meningkatkan efisiensi pasar.	Worldwide Governance Indicators (WGI), World Bank
Foreign Direct Investment (FDI)	Aliran bersih investasi asing langsung sebagai persentase terhadap Produk Domestik Bruto yang mencerminkan peran modal asing dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.	World Development Indicators
Trade Openness (TO)	Rasio total ekspor dan impor terhadap Produk Domestik Bruto yang mencerminkan tingkat keterbukaan perdagangan suatu negara terhadap perekonomian global.	World Development Indicators (WDI), World Bank

Sumber: World Development Indicators dan Worldwide Governance Indicators (World Bank)

Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Riset ASEAN-5 Periode 2009–2023

Variabel	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
GDP Growth (GDPG)	75	4.073	3.542	-9.520	14.520
Control of Corruption (CC)	75	0.144	1.030	-0.890	2.210
Government Effectiveness (GE)	75	0.698	0.857	-0.330	2.320
Regulatory Quality (RQ)	75	0.556	0.815	-0.380	2.310
Foreign Direct Investment (FDI)	75	6.448	8.854	-0.860	33.300
Trade Openness (TO)	75	142.150	107.418	32.970	379.100

Sumber: Hasil pengolahan data (2026)

Tabel 3. Hasil Uji Stasioneritas Data Panel (ADF-Fisher Test)

Variabel	ADF-Fisher Chi-square	Prob.	ADF-Choi Z-stat	Prob.	Orde
GDPG	40.213	0.000	-4.660	0.000	I(1)
CC	19.082	0.039	-2.220	0.013	I(1)
GE	27.261	0.002	-3.312	0.000	I(1)
RQ	33.164	0.000	-3.666	0.000	I(1)
FDI	48.030	0.000	-5.200	0.000	I(1)
TO	48.729	0.000	-5.314	0.000	I(1)

Sumber: Hasil pengolahan data (2026)

Tabel 4. Hasil Estimasi Model Panel ARDL-PMG (Hubungan Jangka Panjang dan Jangka Pendek)

Variabel	Coeff	Std. Error	t-Stat	Prob.
Long-run (Pooled) Coeff				
CC	3.075*	1.779	1.73	0.092
GE	10.494***	1.776	5.91	0.000
RQ	-15.850***	1.605	-9.87	0.000
FDI	0.379**	0.165	2.30	0.027
TO	0.246***	0.020	12.42	0.000
Short-run (PMG) Coeff				
ECT	-0.954***	0.232	-4.1	0.002
Δ CC	11.364	7.259	1.57	0.126
Δ GE	-4.714	6.369	-0.74	0.464
Δ RQ	-0.221	8.771	-0.03	0.980
Δ FDI	0.174	0.205	0.85	0.401
Δ TO	0.083	0.150	0.55	0.584

Catatan: ***, **, and * denote significance at 1%, 5%, and 10% levels, respectively.

Sumber: Hasil estimasi EViews (2026)

Tabel 5a. Koefisien ECT pada Negara ASEAN-5

Negara	ECT	p-value
Indonesia	-1.039	0.014
Malaysia	-0.379	0.017
Filipina	-0.952	0.000
Singapura	-0.640	0.000
Thailand	-1.756	0.000

Sumber: Hasil estimasi EViews (2026)

Tabel 5b. Cross-Section Short-Run Coefficients

Negara	Δ CC	Δ GE	Δ RQ	Δ FDI	Δ TO
Indonesia	4.00 (0.953)	-4.328 (0.848)	1.626 (0.973)	-0.45 (0.335)	-0.049 (0.412)
Malaysia	6.246 (0.974)	-8.017 (0.960)	3.123 (0.961)	0.571 (0.268)	0.249 (0.004)**
Filipina	0.895 (0.992)	-8.20 (0.907)	24.88 (0.814)	0.588 (0.747)	0.587(0.002)***
Singapura	40.165 (0.956)	18.078 (0.939)	-30.112 (0.876)	0.309 (0.008)***	-0.136 (0.001)***
Thailand	5.509 (0.856)	-21.10 (0.318)	-0.625 (0.977)	-0.148 (0.059)*	-0.236 (0.000)***

Catatan: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.10$

Sumber: Hasil estimasi EViews (2026)